

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik adalah salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah dalam mengatur, mengelola dan mengarahkan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan publik tidak hanya memiliki fungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga menjadi representasi dari kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, kualitas sebuah kebijakan dapat diukur berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut diterima dan dijalankan oleh masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan (Hikmawati, 2016).

Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada tahun 2025 muncul fenomena menarik dalam dinamika politik lokal ketika Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga mencapai 250%. Kebijakan ini menimbulkan gelombang penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, baik yang disampaikan melalui media sosial maupun melalui aksi demonstrasi secara langsung. Fenomena ini penting dikaji karena mencerminkan bagaimana respon masyarakat dapat menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan publik (Hakim, 2018). Respon masyarakat tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga politis, karena dapat memengaruhi stabilitas politik lokal, legitimasi kepemimpinan, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dalam kerangka demokrasi lokal, respon masyarakat terhadap kebijakan publik, termasuk dalam bentuk aksi demonstrasi, merupakan wujud partisipasi politik non-elektoral yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan (Peranginangin, 2014).

Kebijakan kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati tahun 2025 menimbulkan masalah yang bukan hanya mengenai ekonomi, tetapi juga terkait bagaimana pemerintah menjelaskan kebijakan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Cara penyusunan dan penyampaian kebijakan yang kurang melibatkan masyarakat membuat orang merasa keputusan itu hanya diambil oleh kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan umum. Akibatnya, terjadi perbedaan pandangan antara

pemerintah yang ingin meningkatkan pendapatan daerah dengan masyarakat yang merasa tertekan oleh kebijakan tersebut. Ini menunjukkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yaitu memperkuat kemampuan keuangan daerah dengan situasi nyata di masyarakat yang justru menimbulkan penolakan.

Selain itu, aksi penolakan terhadap kenaikan PBB-P2 di Pati menunjukkan perubahan cara masyarakat terlibat dalam pemerintahan. Protes ini tidak hanya dianggap sebagai bentuk perlawanan, tetapi juga sebagai tanda masyarakat sadar akan hak-hak mereka dalam sistem demokrasi. Dari sisi politik lokal, penolakan masyarakat terhadap kebijakan ini juga menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketika kebijakan ditentukan tanpa memperhatikan keinginan masyarakat, maka akan muncul krisis kepercayaan yang bisa mengganggu kestabilan pemerintahan daerah. Karena itu, mempelajari aksi masyarakat Pati terhadap kenaikan PBB-P2 sangat penting, karena menunjukkan sejauh mana pemerintah bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan keuangan dan keadilan sosial, serta seberapa efektif partisipasi masyarakat sebagai alat pengawasan terhadap proses pengambilan kebijakan.

Fenomena masyarakat menolak kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati bisa dipahami sebagai bagian dari proses dinamika politik daerah. Kebijakan publik berupa keputusan pemerintah adalah hasil dari sistem politik, sedangkan respons masyarakat baik lewat media sosial maupun bentuk aksi seperti demo adalah masukan yang mencerminkan keinginan, ketidakpuasan dan tuntutan mereka terhadap pemerintah. Jika saluran komunikasi resmi dalam politik tidak berjalan dengan baik, masyarakat akan menggunakan bentuk partisipasi politik non-elektoral sebagai cara alternatif untuk menyampaikan aspirasinya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam kebijakan kenaikan PBB-P2 tidak hanya terletak pada isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga karena kurangnya komunikasi politik yang efektif dan rendahnya kesadaran pemerintah daerah terhadap budaya politik masyarakat setempat. Budaya politik masyarakat yang semakin aktif dan kritis tidak diimbangi dengan mekanisme dialog yang memadai dari pemerintah, sehingga memicu ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, respon masyarakat Pati terhadap kebijakan ini perlu diteliti lebih dalam agar bisa memahami bagaimana interaksi antara kebijakan publik, budaya

politik dan partisipasi politik non-elektoral memengaruhi kredibilitas dan stabilitas pemerintahan daerah dalam sistem demokrasi lokal.

Dengan demikian, penelitian mengenai respon masyarakat terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati tidak hanya relevan untuk memahami dinamika politik lokal, tetapi juga penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya dan menjaga etika politik dalam merumuskan kebijakan publik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan menyebabkan perbedaan antara tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan keinginan masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga mereka. Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang sejauh mana proses pengambilan kebijakan di daerah dilakukan secara melibatkan masyarakat dan adil bagi semua. Selain itu, aksi unjuk rasa warga Pati menunjukkan bagaimana masyarakat menggunakan ruang partisipasi politik untuk menyampaikan harapan dan menekan pemerintah agar lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah setelah aksi, serta bagaimana proses penyelesaian masalah dilakukan guna memulihkan kepercayaan masyarakat dan menjaga kestabilan politik di tingkat lokal.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, mengapa terjadi aksi kolektif masyarakat di Kabupaten Pati terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2 tahun 2025. Pertanyaan ini diarahkan untuk menggali aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik yang mendorong munculnya aksi kolektif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Termasuk peran elite lokal, organisasi masyarakat dan media dalam memperkuat mobilisasi massa. Kedua, bagaimana respon masyarakat dan implikasinya pada demonstrasi tersebut terhadap dinamika politik lokal serta bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana demonstrasi tersebut memengaruhi hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah, serta

bagaimana upaya resolusi konflik dan pemulihan legitimasi pemerintah dilakukan setelah aksi protes terjadi.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Mengapa terjadi aksi kolektif masyarakat di Kabupaten Pati terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2 tahun 2025?
2. Bagaimana respon masyarakat dan implikasinya pada aksi kolektif tersebut terhadap dinamika politik lokal serta bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan secara akademik untuk memperkaya pemahaman dalam bidang ilmu politik dengan menganalisis lebih dalam mengenai bentuk partisipasi politik yang tidak melibatkan pemilihan, terutama aksi kolektif sebagai upaya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka pada konteks politik di tingkat lokal. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara pemerintah daerah dan warga, khususnya bagaimana jalur partisipasi yang tidak formal berfungsi sebagai masukan dalam sistem pemerintahan. Sebagaimana dalam sebuah sistem politik, masyarakat sebagai salah satu unit pada sebuah sistem mampu memberikan pengaruh/input terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini juga berusaha menjelaskan bagaimana komunikasi politik terjadi antara pemerintah dan warga, serta bagaimana perkembangan teknologi, media digital, dan perubahan nilai-nilai politik masyarakat memengaruhi cara orang menyampaikan pendapat dan menanggapi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang hubungan antara negara dan masyarakat, kredibilitas kebijakan, serta perkembangan berbagai bentuk partisipasi politik di dalam sistem demokrasi lokal. Terlebih dengan berkembangnya teknologi dan masyarakat saat ini, bentuk partisipasi politik yang beragam diteliti oleh penulis supaya dapat memberikan pemahaman mendalam kepada dunia akademis.

Secara empirik, penelitian ini memiliki harapan agar bisa memberikan manfaat langsung bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam membuat kebijakan yang lebih responsif, melibatkan masyarakat, serta sejalan dengan keinginan rakyat. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi acuan bagi pembuat

kebijakan dalam menangani konflik kebijakan secara lebih terbuka, jujur dan adil, sehingga mampu mencegah terjadinya krisis kepercayaan dan mengurangi kemungkinan munculnya eskalasi konflik di masa depan. Bagi masyarakat dan organisasi sipil, penelitian ini bisa menjadi dasar untuk memahami pentingnya partisipasi politik sebagai alat untuk mengawasi pemerintahan lokal. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang cara masyarakat setempat berpolitik, serta menunjukkan kesempatan bagi organisasi masyarakat dan LSM untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengawasi kebijakan pemerintah. Terlebih dalam hal komunikasi politik, untuk dapat memberikan pemahaman pentingnya terjalin komunikasi baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun halnya seperti transparansi atau keterbukaan dengan masyarakat menjadi poin utama yang diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, begitupun sebaliknya. Penelitian ini juga dapat memberikan penjelasan bagaimana kebudayaan politik masyarakat di daerah tersebut, serta kontribusi apa saja yang nantinya dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil maupun LSM dalam membantu memberikan pemahaman atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan begitu, penelitian ini bukan hanya memberikan kontribusi bagi bidang akademik, namun juga menyediakan rekomendasi yang berguna untuk manajemen pemerintahan daerah dan penguatan partisipasi masyarakat.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam bentuk tujuh bab yang saling berkaitan dan disajikan secara sistematis sebagaimana berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan situasi nyata yang menjadi dasar penelitian, yakni munculnya konflik politik dan aksi kolektif masyarakat dikarenakan kebijakan kenaikan pajak PBB-P2. Bab ini memaparkan bahwa terdapat berbagai macam permasalahan, salah satunya terkait tentang keabsahan kebijakan dan konflik hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, serta alasan akademik dan empirik mengapa kasus ini perlu diteliti.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian literatur yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti, terutama studi-studi mengenai tindakan kolektif, legitimasi kebijakan publik dan konflik politik lokal di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan gap penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, serta menyusun kerangka analisis yang digunakan untuk membaca hasil penelitian secara kritis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Membahas tentang bagaimana mekanisme penelitian dilakukan di lapangan, seperti pemilihan pendekatan kualitatif, menentukan informan, menggunakan pedoman wawancara wawancara dan dokumen sebagai sumber data, serta teknik analisis yang diterapkan. Bab ini menjelaskan bahwa metode yang dipilih digunakan untuk memahami dinamika konflik, pandangan para pihak terlibat, serta proses politik yang terjadi selama perdebatan terkait kebijakan PBB-P2.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM**

Menjelaskan hasil pemetaan kondisi geografis, demografis, situasi sosial, ekonomi, pendidikan dan politik di Kabupaten Pati yang berkaitan dengan konflik kebijakan PBB-P2. Selain itu, bab ini menjelaskan latar belakang munculnya kebijakan PBB-P2, para pihak yang terlibat, serta kondisi awal yang menyebabkan munculnya penolakan dari masyarakat.

## **BAB V ASPEK SOSIAL DAN POLITIK DALAM MUNCULNYA AKSI KOLEKTIF MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PBB-P2 KABUPATEN PATI**

Bab ini menjelaskan hasil dari analisis mengenai faktor-faktor penting yang mendorong masyarakat dalam melakukan aksi kolektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan kolektif dilatarbelakangi oleh rasa tidak adil dalam beban ekonomi yang dialami, kurangnya penyampaian informasi secara baik dan partisipasi masyarakat yang

rendah, kuatnya rasa persatuan di kalangan komunitas lokal, serta ketimpangan dalam hubungan kekuasaan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Bab ini menyatakan bahwa aksi kolektif adalah bentuk kekecewaan masyarakat serta tindakan menentang kebijakan yang dirasa tidak sah.

## **BAB VI RESPON PEMERINTAH, DAMPAK SOSIAL-POLITIK DAN PENYELESAIAN KONFLIK KEBIJAKAN PBB-P2**

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat berbagai macam bentuk cara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merespon tindakan kolektif masyarakat. Penelitian menemukan adanya respon awal yang defensif, peran DPRD lewat mekanisme Hak Angket, serta perubahan dinamika politik yang terjadi selama konflik berjalan. Bab ini juga menjelaskan dampak sosial dan politik akibat konflik PBB-P2, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat, melemahnya legitimasi pemerintahan daerah, serta munculnya krisis dalam pemimpin. Selain itu, bab ini juga membahas berbagai cara penyelesaian konflik yang digunakan, mulai dari dialog antar pihak secara terbuka, negosiasi mengenai kebijakan, pembatalan kenaikan PBB-P2, hingga dampak politik setelah konflik terjadi.

## **BAB VII PENUTUP**

Menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dengan menjawab pertanyaan penelitian secara terperinci. Kesimpulan menunjukkan bahwa konflik antara PBB dan P2 terjadi karena sistem pengambilan keputusan yang tidak melibatkan semua pihak secara adil dan tidak berimbang. Bab ini juga memberikan saran empirik dan saran akademik sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil penelitian, baik untuk pemerintah daerah maupun dalam mendorong perkembangan studi politik lokal di masa mendatang.